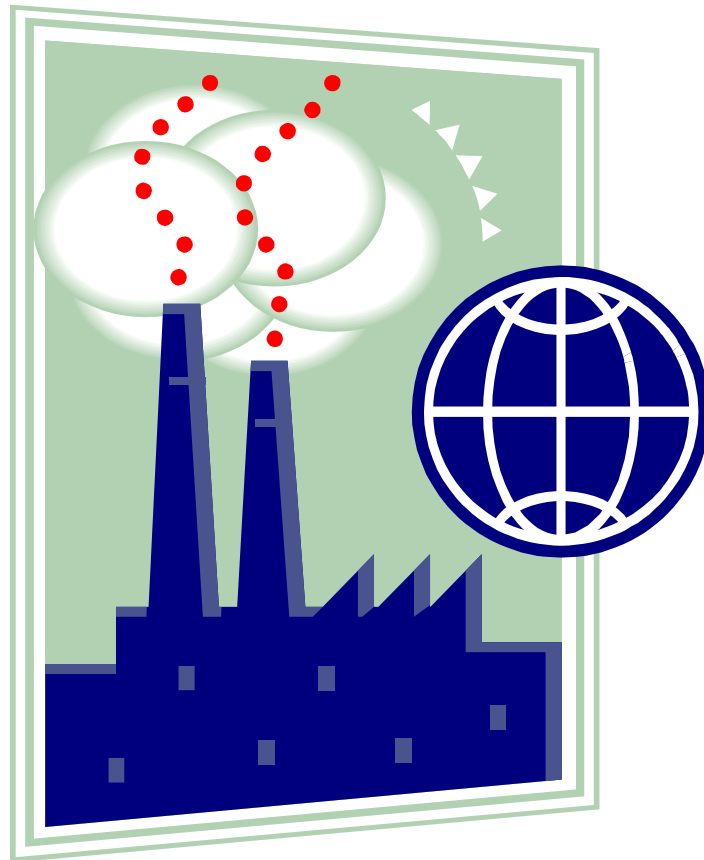


RENCANA KERJA



DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut, Rencana Kerja (RENJA) ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2021 – 2026 yang merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD selama satu tahun dan merupakan penjabaran per tahun dari RPJMD.

Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 merupakan bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2016 – 2021 berisi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada tahun 2025 diantaranya adalah peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, penanganan persampahan, dan penataan Taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Kendal.

Dengan Demikian diharapkan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal benar – benar bisa menjadi acuan dalam penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan pagu pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal sampai dengan tahun 2025.

Tentunya masih banyak kekurangan sempurna dalam kami menyusun Renja Perangkat Daerah tersebut dan akan kami sempurnakan pada tahun – tahun mendatang semoga dokumen ini bermanfaat bagi kita semua.

Demikian untuk menjadi periksa.

Kendal, 21 Agustus 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19660715 199003 1 007

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Landasan Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 5 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 6 |
| | |
| BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU | 8 |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah | 8 |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah | 22 |
| 2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2023..... | 27 |
| 2.4 Isu-isu Penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah | 27 |
| 2.5 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD | 28 |
| 2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat | 41 |
| | |
| BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 42 |
| 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi .. | 42 |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah | 43 |
| 3.3 Program dan Kegiatan | 44 |
| 3.4 Inovasi Perangkat Daerah | 59 |
| | |
| BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 61 |
| | |
| BAB V PENUTUP | 67 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perangkat Daerah ada kewajiban menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan PD kurun waktu satu tahun. Penyusunan Renja PD ini mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra PD, serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Renja PD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496). Renja PD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan akhir RKPD yang disusun kedalam rancangan Renstra PD. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD berdasarkan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

Renja PD dibahas pada forum PD dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui keputusan

Bupati. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Rencana Kerja PD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
 7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
23. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 17.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud :

Rancangan akhir Rencana Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tahun 2025 disusun guna mewujudkan keterpaduan arah kebijakan dan strategi serta keselarasan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan dengan mendasarkan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Kendal dalam agenda mewujudkan misi 4 yaitu mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan :

- Renja ini disusun untuk mewujudkan sasaran RKPD sesuai Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
- Sebagai pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD Tahun 2025;
- Sebagai Evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun berikutnya.
- Memberikan pedoman dalam penyusunan instrument pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
- Memberikan acuan bagi PD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun yang akan datang.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Kerja OPD Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Perangkat Daerah.

BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah dalam rangka memenuhi kriteria SMART-C (specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan 29 continuously improve), Perangkat Daerah agar memberikan penjelasan atas uraian program, kegiatan dan subkegiatan masing-masing Perangkat Daerah;

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan sub kegiatan pada Dinas lingkungan Hidup Tahun 2023 secara umum selaras dengan RPJMD 2021-2026 dan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023. Untuk rencana sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dan sub kegiatan yang capaian targetnya belum tercapai, diusulkan kembali pada tahun 2025.

Hasil Renja Dinas lingkungan Hidup Tahun 2023 secara umum telah dapat dilaksanakan dengan optimal dan dapat mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan dapat terlaksananya semua kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan. Sedangkan rata-rata kinerja realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 94,76%. Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan renja DLH Kabupaten Kendal Tahun 2023 secara singkat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Tahun Anggaran 2023

| No | Program | Keg | Sub Keg | Anggaran | Realisasi | Keu (%) | Fisik (%) |
|----|---|-----|---------|----------------|----------------|---------|-----------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 7 | 23 | 11.189.124.479 | 10.731.854.141 | 95,91% | 100% |
| 2 | Program Perencanaan Lingkungan Hidup | 2 | 4 | 227.890.000 | 216.284.992 | 94,91% | 100% |
| 3 | Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | 3 | 7 | 333.420.000 | 323.245.541 | 96,95% | 100% |
| 4 | Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) | 1 | 3 | 14.476.200.500 | 13.578.988.808 | 93,80% | 99,19 % |
| 5 | Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) | 1 | 1 | 46.945.000 | 46.924.038 | 99,96% | 100% |
| 6 | Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | 1 | 1 | 21.740.000 | 20.514.500 | 94,36% | 100% |
| 7 | Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat | 1 | 2 | 60.000.000 | 57.012.650 | 95,02% | 100% |

| | | | | | | | |
|--------------|---|---|---|----------------|----------------|--------|---------|
| 8. | Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup | 1 | 1 | 10.730.000 | 9.664.000 | 90,07% | 100% |
| 9 | Program Pengelolaan Persampahan | 1 | 2 | 10.619.604.245 | 10.062.150.389 | 95,91% | 100% |
| <i>TOTAL</i> | | | | 36.985.654.224 | 35.046.639.059 | 94,76% | 99,91 % |

Pada tabel diatas bisa dilihat pada keseluruhan Program pada Dinas Lingkungan Hidup dapat mencapai target. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung antara lain sumberdaya manusia yang berkinerja baik yang memudahkan organisasi perangkat daerah mencapai target kinerja serta adanya dukungan dari berbagai sector baik masyarakat maupun pemerintahan sehingga target bisa dicapai.

Tabel 2.2

Tabel : Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2023

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target 2023 | Realisasi 2023 |
|--|--|---------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | | | 58,62 | 57,75 |
| | Indeks Kualitas Air | Skor / indeks | 54,44 | 44,29 |
| | Indeks Kualitas Udara | Skor / indeks | 72,88 | 79,56 |
| | Indeks Kualitas Tutupan Lahan | Skor / indeks | 39,43 | 40,52 |
| Meningkatnya penanganan sampah dan mengurangi timbulan sampah | Jumlah Timbulan Sampah yang Tertangani | Persen | 95 | 41,88 |
| | timbulan sampah yang ditangani | Ton | 35.040 | 66.058,02 |

a. Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas lingkungan Hidup kabupaten Kendal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar sektor dan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan program kegiatan pengelolaan lingkungan hidup;

2. Terbatasnya data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
3. Rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
4. Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
5. Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk pemantauan dan pengawasan LH;
6. Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal, daya tampung TPA yang terbatas; dan
7. Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktifitas dan peningkatan kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam implementasinya sesuai RTRW yang ada, khususnya berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam.

b. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
2. adanya dana DAK bidang LH yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal;
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR);
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (kegiatan-kegiatan pro swadaya masyarakat sering dilaksanakan); dan

5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.
- 3). Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja dan kegiatan-kegiatan yang belum mencapai target antara lain :
 - a. Melakukan Monitoring, Evaluasi atas pelaksanaan kegiatan dan pekerjaan yang dianggap kurang optimal pelaksanaannya;
 - b. Menganalisa data dan permasalahan yang ada; dan
 - c. Mengusulkan anggaran lanjutan untuk sub kegiatan yang diperkirakan tidak akan selesai di tahun bersangkutan dan peningkatan target, sesuai prioritas daerah.

Adapun secara rinci evaluasi pelaksanaan Renja Dinas lingkungan Hidup diuraikan pada Tabel Rekapitulasi Evaluasi T-C.29

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

| KODE | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023) | | | Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|-----------------|---|--|--|--|---|---|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (2023) | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024) | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = (7/6) | 9 | 10 = (5+7+9) | 11 = (10/4) |
| 2 | Urusan Wajib Pelayanan Dasar | | | | | | | | | |
| 2 11 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | |
| 2 11 01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | 100 % | 98,46 | 100 | 98,46 | | 100 | 98,97 | 47 |
| 2 11 01 2 01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan, dokumen perencanaan yang disusun | 18 kali | 12 | 16 | 12 | 100% | 18 | 14 | 25 |
| 2 11 01 2 01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 dokumen | 0 | 12 | 0 | 0% | 12 | 4 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|----------------|-----|-----|---------|------|----|-----|----|
| 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 18 laporan | 12 | 16 | 16 | 100% | 18 | 7,2 | 45 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 12 laporan | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Gaji dan tunjangan ASN yang disediakan pemda | 12 bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 54 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 12 orang/bulan | 12 | 110 | 110 org | 100% | 12 | 12 | 54 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 02 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 dokumen | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | - | - |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | meningkatnya wawasan dan pengetahuan ASN dinas | 12 bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 80 orang | 120 | 25 | 25 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Terpenuhinya kebutuhan umum dinas | 12 bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 35 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12 | 1 | 1 | 100% | 12 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|-------------|------------|-----|------------|------|------------|-----|----|
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 12 | 1 | 1 | 100% | 12 | 12 | 25 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 55 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 Dokumen | 12 | 12 | 12 | 100% | 0 | - | - |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 25 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | tersedianya aset dan barang dinas | 6 unit | 0 | 5 | 0 | 0% | 3 | - | - |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | 0 | 3 | 3 | 100% | 0 | - | - |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tepenuhinya kebutuhan umum penunjang urusan dinas | 12 | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 50 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 900 laporan | 590 lembar | 800 | 590 lembar | 100% | 800 lembar | 400 | 50 |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | 12 laporan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|------------|-----|-----|-----|------|----------|----|--|--|--|----|--|
| | | | | | | | Air dan Listrik yang Disediakan | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | | | | 55 | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terpeliharanya aset dan barang milik dinas | 12 bulan | 12 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | | | | 40 | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 144 Unit | 52 | 139 | 139 | 100% | 141 unit | 28 | | | | 20 | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 12 unit | 0 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | | | | 25 | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 1 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | | | | 0 | |
| 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 Unit | 0 | 2 | 2 | 100% | 1 | - | | | | - | |
| 2 | 11 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku | 78% | 70% | 74% | 70% | 100% | 76% | 72 | | | | 50 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|------------|-----|----|----|--------|-----------|------|------|
| 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | jumlah dokumen RPPLH yang disusun | 4 Dokumen | | 4 | 0 | 0% | 4 Dokumen | 2 | 50 |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 01 | Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun | 4 Dokumen | 4 | 3 | 3 | 100% | 4 Dokumen | 2,8 | 70 |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 02 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 26 dokumen | 0 | 10 | 10 | 100% | 24 | 8 | 40 |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen KLHS tata ruang dan PJMD yang disusun | 7 Dokumen | 2 | 3 | 2 | 100% | 6 | 3,5 | 50 |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 01 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | 5 Dokumen | 0 | 3 | 2 | 66,66% | 3 | 0,9 | 30 |
| 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 03 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun | 1 Dokumen | | 2 | 1 | 50% | 0 | 0,8 | 80 |
| 2 | 11 | 03 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | Cakupan pemantauan kualitas air | 90% | 50% | 70 | 50 | 100% | 80% | 40,5 | 40,5 |
| | | | | | | | Cakupan pemantauan kualitas udara | 90% | 50% | 70 | 50 | 100% | 80% | 40,5 | 40,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|------------|---|---|---|------|------------|------|----|
| 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen pemantauan lingkungan | 3 dokumen | 1 | 3 | 1 | 100% | 3 | 0,45 | 15 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 01 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | 62 dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | 56 dokumen | 1,05 | 35 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | Jumlah lokasi yang dilakukan pembinaan | 4 lokasi | 0 | 2 | 0 | 0% | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 01 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 laporan | 2 | 1 | 1 | 100% | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 03 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan Jumlah titik Penghentian sumber pencemar sungai melalui Ipal UKM/Ponpes | 4 titik | 0 | 1 | 1 | 100% | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota | lokasi lahan yang dipulihkan | 2 lokasi | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 42 |
| 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 04 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi | 2 dokumen | 0 | 1 | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|--|-----------------|-----------|---------|----------|------|---------|--------|------|--|--|--|
| | | | | | | | dan Pelaksanaan Rehabilitasi | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 04 | | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | Presentase KEHATI yang dikelola (alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik | 19,52% | 17,59 | 18,56 | 17,59 | 100% | 19,04 | 5,08 | 25,4 | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | | | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota | jumlah alun-alun, hutan kota, taman yang dikelola pemda | 34 unit | 36 | 32 | 36 | 100% | 33 | 8,89 | 25,4 | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 04 | | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 10.504 Ha | 29 lokasi | 9,14 Ha | 10,84 Ha | 118% | 10.504 | 2,2 Ha | 22 | | | |
| 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 06 | | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 6 orang | 0 | 100 | 100 | 100% | 6 orang | 3 | 50 | | | |
| 2 | 11 | 05 | | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui | 80 % | 72 | 76 | 72 | 100% | 78% | 16 | 20 | | | |
| 2 | 11 | 05 | 2 | 02 | | | Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota | Jumlah rekomendasi dan koordinasi pengumpulan limbah B3 yang dilakukan | 52 dok/kegiatan | 29 | 30 | 29 | 100% | 46 | 12,6 | 21,7 | | | |
| 2 | 11 | 05 | 2 | 02 | 02 | | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, | 32 dokumen | 29 | 10 | 10 | 100% | 31 | 2,2 | 21,7 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|--|----------------|----|----|----|------|---------------|-------|------|
| | | | | | | Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kab/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | | | | |
| 2 | 11 | 06 | | | | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | 55 % | 35 | 45 | 35 | 100% | 50% | 15,18 | 25,3 |
| 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah usaha dan pembinaan teknis pengelolaan lingkungan | 100 perusahaan | 60 | 80 | 60 | 100% | 90 perusahaan | 25,3 | 25,3 |
| 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 04 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH | 20 dokumen | 0 | 10 | 0 | 0% | 15 | - | - |
| 2 | 11 | 08 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | Prosentase masyarakat yang dibina | 15 % | 0 | 10 | 0 | 0% | 10 % | 1,5 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|--|--|--------------|--------|--------|--------|-------|-----------|-------|----|
| 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota | jumlah lembaga yang mendapat penyuluhan lingkungan hidup | 10 lembaga | 1 | 7 | 1 | 100 % | 9 lembaga | 1,1 | 10 |
| 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 01 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan | Jumlah Lembaga/ kelompok Masyarakat/ Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH | 5 lembaga | 1 | 10 | 10 | 100% | 5 lembaga | 2,75 | 55 |
| 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 03 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 2 orang | 0 | 1 Keg | 1 Keg | 100 % | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 10 | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | 70 % | - | 50 | 0 | 0% | 60 | 64 | 80 |
| 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota | Jumlah penyelesaian pengaduan di bidang pengelolaan lingkungan hidup | 70 % | - | 50 | 0 | 0% | 60 | 64 | 80 |
| 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 01 | Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kab/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani | 70 pengaduan | - | 20 | 20 | 100% | 60 | 8 | 80 |
| 2 | 11 | 11 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | Timbulan sampah yang Ditangani | 37.595 ton | 32.850 | 35.040 | 32.850 | 100% | 36.136 | 5.800 | 15 |
| | | | | | | | Prosentase sampah yang Dikelola | 24,47 % | 21,95 | 23,11 | 21,95 | 100% | 23,67% | 3,75 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|---|----|----|---|---|-------------------|--------|---------------|--------|------|--------------------|------|----|
| | | | | | | | Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah | 106 desa/kel | 92 | 100 | 92 | 100% | 103 desa/kel | 16 | 15 |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | | Pengelolaan Sampah | Jumlah sampah yang tertangani | 33.654 ton | 19.547 | 31.947 | 19.547 | 100% | 32.795 ton | 5200 | 15 |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 03 | Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kab/Kota | 92.020 m3 (2 ton) | 91.980 | 2.520 (2 ton) | 2.520 | 100% | 92.000 ton (2 ton) | 0 | 0 |
| 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 07 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 unit | 0 | 5 | 5 | 100% | 1 unit | - | - |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) merupakan OPD yang menangani urusan wajib bidang lingkungan hidup berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

Secara umum, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal telah dapat melaksanakan tugas utama yaitu :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Lingkungan Hidup;
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
3. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Lingkungan Hidup;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang Lingkungan Hidup; dan
7. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati di bidang lingkungan hidup.

Dari target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2023, seluruh kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dengan tingkat keberhasilan yang baik pada semua indikator capaian program, yaitu antara lain :

1. Meningkatnya jumlah skor indek kualitas lingkungan hidup;
2. Meningkatnya jumlah skor indeks tutupan lahan;
3. Bertambahnya jumlah taman dan RTH Perkotaan yang ada di Kabupaten Kendal; dan
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dan para pelaku usaha (Pengusaha) terhadap kelestarian lingkungan.

Dalam rangka mendukung dan mencapai tujuan sasaran daerah Kabupaten Kendal ditetapkan beberapa strategi dan kebijakan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan merupakan alat untuk mencapai kinerja pelayanan sesuai tupoksi yang dimandatkan ke Dinas Lingkungan Hidup.

Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar

Pelayanan Minimal (SPM) maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Tolok ukur dan indikator kinerja SPM mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Menurut peraturan tersebut ada 4 jenis pelayanan dasar yang harus dilaksanakan Kabupaten/Kota yaitu :

1. Pencegahan pencemaran air dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pecemaran air dengan jumlah usaha dan / atau kegiatan yang diawasi dikalikan 100%;
2. Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak dengan indikatornya adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara yang merupakan hasil pembagian dari jumlah usaha dan / atau kegiatan sumber tidak bergerak yang telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara dengan jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventaris dikalikan 100%;
3. Penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomasa dengan indikatornya adalah persentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya yang merupakan hasil pembagian dari luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa pada tahun berjalan dengan luasan lahan yang diperuntukan

sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa dikalikan 100%;

4. Tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dengan indikatornya adalah prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti yang merupakan hasil pembagian dari jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dengan 52 jumlah pengaduan yang diterima instansi lingkungan hidup kabupaten/kota dalam 1 tahun dikalikan 100%.

Tolok ukur dan indikator kinerja didasarkan pada perhitungan teknis, selanjutnya hasil analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel 2.2 T-C.30 berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Kendal

| NO | INDIKATOR | SATUAN (IKU, SPM, IKK) | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH | | | | REALISASI CAPAIAN | | PROYEKSI | | CATATAN ANALISIS |
|----------|--|---------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|-------------------|-----------------|----------|----------|------------------|
| | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2023 | 2024 (TW II) | 2025 | 2026 | |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | <i>e</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>H</i> | <i>i</i> | <i>J</i> | <i>K</i> | <i>l</i> | <i>m</i> |
| 1 | Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah | Persen | 100% | 100% | 100% | 100% | 98,46 | 47% | 100% | 100% | |
| 2 | Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan yang berlaku | Persen | 74% | 76% | 78% | 80% | 70% | 50% | 78% | 80% | |
| 3 | Cakupan pemantauan kualitas air | Persen | 70% | 80% | 90% | 100% | 50% | 40,5% | 90% | 100% | |
| 4 | Cakupan pemantauan kualitas udara | Persen | 70% | 80% | 90% | 100% | 50% | 40,5% | 90% | 100% | |
| 5 | Presentase KEHATI yang dikelola (alunalun, hutan kota, taman yang dikelola pemda) yang terpelihara dengan baik | Persen | 18,56% | 19,04% | 19,52% | 20% | 17,59% | 25,4% | 19,52% | 20% | |
| 6 | Persentase dokumen persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 yang disetujui | Persen | 76% | 78% | 80% | 80% | 72% | 20% | 80% | 80% | |
| 7 | Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH | Persen | 45% | 50% | 55% | 60% | 35% | 25,3% | 55% | 60% | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|--------|--------|--|
| | yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota | | | | | | | | | | |
| 8 | Prosentase masyarakat yang dibina | Persen | 10% | 10% | 15% | 15% | 0 | 10% | 15% | 15% | |
| 9 | Persentase masyarakat yang mendapatkan penghargaan lingkungan hidup | Persen | 20% | 25% | 30% | 30% | 0 | 0 | 30% | 30% | |
| 10 | Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti | Persen | 50% | 60% | 70% | 80% | 0 | 80% | 70% | 80% | |
| 11 | Timbulan sampah yang ditangani | Ton | 35.040 | 36.136 | 37.595 | 38.653 | 32.850 | 15% | 37.595 | 38.653 | |
| 12 | Prosentase sampah yang dikelola | Persen | 23,11% | 23,67% | 24,47% | 25% | 21,95% | 15% | 24,47% | 25% | |
| 13 | Jumlah daerah layanan pengangkutan sampah | Desa/Kel | 100 desa/ kel | 103 desa/ kel | 106 desa/ kel | 108 desa/ kel | 92 desa/ kel | 15% | 106 | 108 | |

2.3 Prestasi yang dicapai pada tahun 2023

Prestasi yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal pada Tahun 2023 antara lain :

1. *Penghargaan Partisipasi Proklamasi (Program Kampung Iklim)*

A. Proklamasi dengan Kategori Madya

1. Dusun Krajan Desa Gebangan Kecamatan Pageruyung
2. Desa Blimbing Kecamatan Boja

B. Proklamasi dengan Kategori Pratama

1. Desa Tlogopayung Kecamatan Plantungan

2. *Penghargaan Adiwiyata (Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah)*

A. Adiwiyata Tingkat Provinsi Jawa Tengah :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. SMPN 1 KANGKUNG; | 6. SDN 2 BOJA; |
| 2. SMPN 3 CEPILING; | 7. SDN 2 SUKOREJO; |
| 3. SMPN 2 BOJA; | 8. MIN 1 KENDAL; |
| 4. SMPN 3 WELERI; | 9. MIN 2 KENDAL; dan |
| 5. SDN 1 PATUKANGAN; | 10. MINU 45 TRIMULYO. |

B. Adiwiyata Tingkat Nasional :

1. SMAN 1 SUKOREJO
2. SMAN 1 BOJA
3. SMPN 1 BOJA
4. SMPN 4 CEPILING

3. *Penghargaan Adipura atas Kinerja dalam Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau Wilayah Kota Tahun 2023.*

2.4. Isu-isu Penting Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu – isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, yaitu :

1. Menurunnya kualitas lingkungan antara lain air dan udara yang disebabkan meningkatnya usaha atau kegiatan eksploitasi alam oleh pelaku usaha sehingga berpotensi mencemari dan merusak lingkungan;
2. Belum optimalnya kinerja pengelolaan sampah karena kondisi TPA yang belum memadai sehingga masih banyak sampah yang belum terolah dengan baik;

3. Belum layak nya kondisi sarana dan prasarana pengelolaan dan pengangkutan sampah sehingga masih banyak sampah yang belum terangkut ke TPA dengan baik;
4. Belum optimal nya penataan Ruang Terbuka Hijau terutama RTH publik;
5. Meningkat nya produksi limbah B3 dan belum dikelola dengan baik;
6. Kurang tersedianya data yang up to date dalam menunjang perencanaan lingkungan hidup; dan
7. Masih adanya masyarakat Kabupaten Kendal yang belum mendapatkan pelayanan sampah.

2.5. Review Terhadap Rancangan Awal SKPD

RKPD adalah salah satu acuan OPD dalam penyusunan Renja OPD, selain RENSTRA OPD. RKPD disusun dalam rangka sinkronisasi pembangunan daerah.

Perumusan Rancangan akhir RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam Rancangan Awal RKPD Propinsi dengan rancangan Renja OPD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/propinsi tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan Rancangan akhir RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja OPD serta untuk mengharmoniskan dan mensinergikan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan nasional dan propinsi.

Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal juga melaksanakan urusan-urusan wajib sesuai perda Kabupaten Kendal nomor 14 tahun 2007 tentang urusan Pemerintah dan urusan Pemerintahan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kendal serta Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup. Pada Rancangan akhir Renja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 mengalami perubahan yang berarti terhadap rancangan awal RKPD 2025. Terdapat beberapa pengalihan dan pengurangan anggaran pada sub kegiatan. Penjelasan lebih detail kami lampirkan **Tabel 2.5**.

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Kendal

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|-----------------------|---|--------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 30.062.488.361 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 36.477.026.561 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 30.062.488.361 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 36.477.026.561 | |
| | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 30.062.488.361 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 36.477.026.561 | |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 15.602.488.361 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 14.983.580.670 | |
| | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | <i>265.000.000</i> | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | | | | <i>301.200.000</i> | |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 145.000.000 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 12 Dokumen | 145.000.000 | |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan | 60.000.000 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 16 Laporan | 74.200.000 | |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 60.000.000 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 4 Laporan | 82.000.000 | |
| | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | <i>11.000.000.000</i> | <i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | | | | <i>10.209.046.200</i> | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 98 orang/bulan | 11.000.000.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 98 orang/bulan | 10.209.046.200 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 50.000.000 | <i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | | | | 125.000.000 | |
| | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 0 Paket | 0 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 100 Paket | 75.000.000 | |
| | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 orang | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 orang | 0 | |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 orang | 50.000.000 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 15 orang | 50.000.000 | |
| | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 999.888.361 | <i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i> | | | | 763.844.470 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 100.000.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 paket | 75.000.000 | |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 159.640.000 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 paket | 125.000.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 65.060.000 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 12 paket | 128.840.000 | |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 630.188.361 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 laporan | 425.004.470 | |
| | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 dokumen | 45.000.000 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 12 dokumen | 10.000.000 | |
| | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 0 | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 240.450.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 unit | - | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 3 unit | 0 | |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 0 unit | - | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 11 Unit | 42.800.000 | |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 0 unit | - | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 1 unit | 197.650.000 | |
| | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 1.707.600.000 | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 1.963.390.000 | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 9.000.000 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 laporan | 10.000.000 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 655.000.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 laporan | 942.500.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.043.600.000 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 laporan | 1.028.890.000 | |
| | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 1.580.000.000 | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 1.380.650.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 141 unit | 1.220.000.000 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 141 unit | 1.050.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|---|----------------|----------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 unit | 50.000.000 | Pemeliharaan Mebel | | Jumlah Mebel yang Dipelihara | 3 unit | 65.000.000 | |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 115.000.000 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 20 unit | 68.000.000 | |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 195.000.000 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yg Dipelihara/ Direhabilitasi | 1 unit | 197.650.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 275.000.000 | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 225.000.000 | |
| | <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>150.000.000</i> | <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>225.000.000</i> | |
| | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 4 dokumen | 80.000.000 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | 4 dokumen | 80.000.000 | |
| | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | jumlah dokumen RPPLH di kab/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 4 dokumen | 70.000.000 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | | jumlah dokumen RPPLH di kab/kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | 4 dokumen | 145.000.000 | |
| | <i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>125.000.000</i> | <i>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota</i> | | | | 0 | |
| | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 1 dokumen | 75.000.000 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun | 0 dokumen | 0 | |
| | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun | 3 dokumen | 50.000.000 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kab/Kota yang Disusun | 0 dokumen | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|----------------|-----------------------|--|--------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 11.605.000.000 | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 10.810.988.907 | |
| | <i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota</i> | | | | <i>230.000.000</i> | <i>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota</i> | | | | <i>185.090.000</i> | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut | 3 dokumen | 150.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah Air, Udara, dan Laut | 3 dokumen | 135.090.000 | |
| | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 2 dokumen | 30.000.000 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | 0 dokumen | 0 | |
| | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 dokumen | 50.000.000 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | 1 dokumen | 50.000.000 | |
| | <i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>90.000.000</i> | <i>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>77.360.000</i> | |
| | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kab/Kota yang Dilaksanakan | 2 laporan | 30.000.000 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | 2 laporan | 19.600.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | 2 lokasi | 30.000.000 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | 2 lokasi | 27.980.000 | |
| | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 2 titik | 30.000.000 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | 2 titik | 29.780.000 | |
| | <i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> | | | | 11.285.000.000 | <i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> | | | | 10.548.538.907 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 12 dokumen | 5.400.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | 12 dokumen | 4.874.618.583 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | 4 kegiatan | 5.830.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | 4 kegiatan | 5.647.770.324 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 2 kegiatan | 55.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | 2 kegiatan | 26.150.000 | |
| | | | | | | | | | | | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|---|----------------|----------------------|--|--------|---|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 1.100.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 5.650.000.000 | |
| | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>1.100.000.000</i> | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>5.650.000.000</i> | |
| | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Ha | 1.000.000.000 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota | 11 Ha | 5.500.000.000 | |
| | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 6 orang | 100.000.000 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | 6 orang | 150.000.000 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 150.000.000 | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 133.360.000 | |
| | <i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i> | | | | <i>30.000.000</i> | <i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i> | | | | <i>25.500.000</i> | |
| | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 3 laporan | 30.000.000 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | 3 laporan | 25.500.000 | |
| | <i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>120.000.000</i> | <i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>107.860.000</i> | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 dokumen | 120.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | 1 dokumen | 107.860.000 | |
| | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | 110.000.000 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | | 6.760.000 | |
| | <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> | | | | <i>110.000.000</i> | <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> | | | | <i>6.760.000</i> | |
| | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yg Diberikan | 4 dokumen | 50.000.000 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yg Diberikan | 0 dokumen | 0 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 25 badan usaha | 60.000.000 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi | 25 badan usaha | 6.760.000 | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 100.000.000 | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 43.999.484 | |
| | <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>100.000.000</i> | <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>43.999.484</i> | |
| | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 2 orang | 50.000.000 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 2 orang | 36.699.484 | |
| | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat | | Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 5 lembaga | 50.000.000 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat | | Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 5 lembaga | 7.300.000 | |
| | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 50.000.000 | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | | 27.480.000 | |
| | <i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>50.000.000</i> | <i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | <i>27.480.000</i> | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|--|--------|--|----------------|----------------------|--|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 4 entitas | 50.000.000 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | 4 entitas | 27.480.000 | |
| | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 30.000.000 | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 16.760.000 | |
| | <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>30.000.000</i> | <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>16.760.000</i> | |
| | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani | 10 pengaduan | 30.000.000 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani | 10 pengaduan | 16.760.000 | |
| | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 1.040.000.000 | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 4.579.097.500 | |
| | <i>Pengelolaan Sampah</i> | | | | <i>990.000.000</i> | <i>Pengelolaan Sampah</i> | | | | <i>4.579.097.500</i> | |
| | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 10 kelompok | 120.000.000 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 10 kelompok | 120.000.000 | |
| | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana | 1 dokumen | 15.000.000 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana | 1 dokumen | 15.000.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|----------------------|---|--------|--|----------------|----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | | | dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | | | | | dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kab/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | | | |
| | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 unit | 195.000.000 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 1 unit | 3.055.250.000 | |
| | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota yang disusun & ditetapkan | 1 dokumen | 25.000.000 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kab/kota yang disusun & ditetapkan | 1 dokumen | 199.129.824 | |
| | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan aturan perundangan | 36.136 Ton | 300.000.000 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan aturan perundangan | 36.136 Ton | 954.717.676 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|-----|---|--------|--|----------------|-----------------------|---|--------|--|----------------|-----------------------|-----------------|
| | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Indikatif (Rp.) | Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu Kebutuhan (Rp.) | |
| (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | (k) | (l) |
| | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 10 laporan | 300.000.000 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | 10 laporan | 150.000.000 | |
| | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | 1 dokumen | 35.000.000 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | | jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | 1 dokumen | 35.000.000 | |
| | <i>Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</i> | | | | 50.000.000 | <i>Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/ Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</i> | | | | 50.000.000 | |
| | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi | 12 rekomendasi | 50.000.000 | Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik | | Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi | 12 rekomendasi | 50.000.000 | |
| | | | | | 30.062.488.361 | | | | | 36.477.026.561 | |

2.6 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil musrenbang Kabupaten yang diadakan oleh Baperlitbang Kabupaten Kendal terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan yang diusulkan dari Desa/Kelurahan yang diakomodir di Renja DLH Kabupaten Kendal Tahun 2025. Dalam penjaringan aspirasi tersebut, ada sebanyak 10 usulan yang diakomodir DLH dan dimasukkan ke dalam 3 sub kegiatan Renja Tahun 2025.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL

| NO | SUB KEGIATAN | LOKASI | INDIKATOR KINERJA | BESARAN / VOLUME | CATATAN |
|----------|--|-------------|--|--|---|
| <i>a</i> | <i>b</i> | <i>c</i> | <i>d</i> | <i>e</i> | <i>f</i> |
| 1 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | Kab. Kendal | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi | 3 Desa (Desa Pesaren, Desa Kalices, Desa Kalibareng) | Penyediaan dan penanaman bibit tanaman konservasi |
| 2 | Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan | Kab. Kendal | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | 5 (Desa Wonodadi, Desa Sambongsari, Desa Boja, Desa Mulyosari, Desa Kaliputih) | pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan sampah |
| 3 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Kab. Kendal | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | 2 (Desa Bangunsari, Desa Putatgede) | pembangunan TPS3R, dengan catatan desa mengajukan proposal ke DLH dan kita usulkan dulu ke pusat melalui DANA DAK |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional dan kebijakan provinsi

Dalam penyusunan Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup telah diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal. Penyelarasan ini dimaksudkan untuk mensinergiskan pembangunan dari pusat sampai daerah. Adapun kegiatan dalam renja Dinas Lingkungan Hidup apabila disandingkan dengan kebijakan pusat diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut

Tabel : 3.1. Penyelarasan Kebijakan Pembangunan Nasional/Pusat dan Kabupaten serta Rencana Kerja Tahun 2025.

| Kebijakan Pusat | Kebijakan Provinsi | Prioritas Pembangunan Kab.Kendal | Prog./Keg./Sub Keg. RENJA Tahun 2025 |
|--|--------------------------------|--|---|
| Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi | Peningkatan nilai kualitas air | Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan | <ol style="list-style-type: none">1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
| Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | Peningkatan IKLH | peningkatan kualitas lingkungan terutama pengelolaan sampah yang terintegrasi | <ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Persampahan2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup3. Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)5. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat7. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup |

Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021- 2026. Tema Pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024 adalah "Menuju Kendal *Inclusive* 2025 melalui Pemerataan Pembangunan dan Perekonomian". Pada tahun ini, pembangunan akan menitikberatkan pada "Mewujudkan pembangunan daerah dan ekonomi yang merata dengan meningkatkan kualitas infrastruktur yang mantap dan berkeadilan". Di samping hal tersebut, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal juga melaksanakan pembangunan yang bersifat *mainstreaming* yaitu pembangunan gender, penanganan *stunting* dan penanggulangan kemiskinan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Bupati Kendal sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal merujuk pada Misi Bupati yang bersinggungan secara langsung pada misi ke-4 (empat) yaitu "Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan".

Sesuai dengan tupoksinya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah, dimana pada tahun 2025 mendatang diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal dapat semakin meningkat kinerjanya. Tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tujuan, Sasaran dan Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

| Misi ke-4 (empat) : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata dan berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan | | |
|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Program Prioritas |
| Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya udara dan tanah yang | Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan | 1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota. 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup. |

| | | |
|--|--|---|
| diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan industri | | |
| Meningkatnya kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah | Meningkatnya pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3R | 1. Program Pengelolaan Persampahan |
| Meningkatnya penataan RTH publik | Penataan taman / RTH perkotaan | 1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) |
| | | |

a. Tujuan

- Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup khususnya udara dan tanah yang diakibatkan oleh aktifitas pembangunan dan kegiatan industri
- Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan sampah
- Meningkatkan penataan RTH publik

b. Sasaran

- Meningkatkan perbaikan kualitas lingkungan
- Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan metode 3 R
- Penataan taman / RTH perkotaan

3.3 Program dan Kegiatan

- a. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan akhir RKPD, baik jenis program, kegiatan, sub kegiatan serta pagu indikatif.
- b. Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal

| No | Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|-----------|----------|-----------|-----------|---|----|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| a | B | | | | | C | D | E | F | G | h | I | j | K |
| | | | | | | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | | | | 36.477.026.561 | | | | 32.750.000.000 |
| | 2 | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | 36.477.026.561 | | | | 32.750.000.000 |
| | 2 | 11 | | | | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP | | | | 36.477.026.561 | | | | 32.750.000.000 |
| I. | 2 | 11 | 01 | | | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 14.983.580.670 | | | | 17.125.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | <i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> | <i>Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi perangkat daerah</i> | | | 301.200.000 | | | | 300.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Kab. Kendal | 12 Dokumen | 145.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 160.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Kab. Kendal | 16 Laporan | 74.200.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 01 | 0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Kab. Kendal | 4 Laporan | 82.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----------|----------|----|----|---|----|------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | 10.209.046.200 | | | | 11.500.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | | 98 orang/bulan | 10.209.046.200 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 11.500.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | 125.000.000 | | | | 200.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | | 100 Paket | 75.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 80.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | | 0 orang | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 50.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 05 | 0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | | 15 orang | 50.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 70.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | 763.844.470 | | | | 1.065.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 75.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 120.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | | 12 paket | 125.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | 170.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | | 12 paket | 128.840.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 70.000.000 | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat | | 12 laporan | 425.004.470 | Pendapatan Asli Daerah | | 650.000.000 | |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----------|----------|----|----|---|----|------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | | Koordinasi dan Konsultasi SKPD | | | | (PAD) | | | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 06 | 0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | | 12 dokumen | 10.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 55.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | | <i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | | | | 240.450.000 | | | | 600.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | | 3 unit | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 400.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | | 11 Unit | 42.800.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 150.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 07 | 0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | | 1 unit | 197.650.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | | <i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | | 1.963.390.000 | | | | 1.810.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | | 12 laporan | 10.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | | 10.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | 12 laporan | 942.500.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 700.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | | 12 laporan | 1.028.890.000 | Pendapatan Asli Daerah | | | 1.100.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|--|---|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | | Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | | | | (PAD) | | | |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | | <i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | | | 1.380.650.000 | | | | | 1.650.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | | 141 unit | 1.050.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 1.200.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 0005 | Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara | | 3 unit | 65.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | | 60.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | | 20 unit | 68.000.000 | Pendapatan Asli Daerah | | | 120.000.000 |
| | 2 | 11 | 01 | 2 | 09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | | 1 unit | 197.650.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 220.000.000 |
| II. | 2 | 11 | 02 | | | | PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 225.000.000 | | | | 355.000.000 |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | | <i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i> | | | | 225.000.000 | | | | 190.000.000 |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota | | 4 dokumen | 80.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 100.000.000 |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 01 | 0006 | Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota | jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang | | 4 dokumen | 145.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 90.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|-------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | | berisi arahan/muatan RPPLH kab/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/ Kota | | | 0 | | | | | 165.000.000 |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 0002 | Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD | Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten /Kota yang Disusun | | 0 dokumen | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 95.000.000 |
| | 2 | 11 | 02 | 2 | 02 | 0005 | Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang | Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun | | 0 dokumen | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 |
| III. | 2 | 11 | 03 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 10.810.988.907 | | | | 12.115.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota | | | | 185.090.000 | | | | 290.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut | | 3 dokumen | 135.090.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 170.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan | | 0 dokumen | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----------|----------|----|----|---|----|------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | Adaptasi Perubahan Iklim | Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 01 | 0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota | Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan | | 1 dokumen | 50.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | | <i>Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</i> | | | | 77.360.000 | | | | 150.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat | Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan | | 2 laporan | 19.600.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 0002 | Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi | | 2 lokasi | 27.980.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 02 | 0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup | Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan | | 2 titik | 29.780.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | | <i>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</i> | | | | 10.548.538.907 | | | | 11.675.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Dokumen | | 12 dokumen | 4.874.618.583 | Pendapatan | | | 5.600.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | Penghentian Sumber Pencemaran | Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan | | | | Asli Daerah (PAD) | | | |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 0012 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota | | 4 kegiatan | 5.647.770.324 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 6.000.000.000 |
| | 2 | 11 | 03 | 2 | 03 | 0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi | jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan | | 2 kegiatan | 26.150.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 75.000.000 |
| IV. | 2 | 11 | 04 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) | | | | 5.650.000.000 | | | 1.320.000.000 | |
| | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | | <i>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/ Kota</i> | | | | <i>5.650.000.000</i> | | | <i>1.320.000.000</i> | |
| | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) | Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan | | 11 Ha | 5.500.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 1.200.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|-----------|----------|-----------|-----------|---|----|------|--|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| a | B | | | | | | C | D | E | F | G | h | I | j | K |
| | | | | | | | | Kabupaten/Kota | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 04 | 2 | 01 | 0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati | | 6 orang | 150.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 120.000.000 |
| V. | 2 | 11 | 05 | | | | PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) | | | | 133.360.000 | | | | 180.000.000 |
| | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | | <i>Penyimpanan sementara Limbah B3</i> | | | | 25.500.000 | | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 05 | 2 | 01 | 0002 | Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 | Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3 | | 3 laporan | 25.500.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 05 | 2 | 02 | | <i>Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | 107.860.000 | | | | 130.000.000 |
| | 2 | 11 | 05 | 2 | 02 | 0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, | | 1 dokumen | 107.860.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 130.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|---|--|---|------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | | Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya | | | | | | | |
| VI. | 2 | 11 | 06 | | | | | PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) | | | 6.760.000 | | | | 150.000.000 |
| | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | | | <i>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | 6.760.000 | | | | 150.000.000 |
| | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 0001 | | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH | Jumlah Rekomendasi dan/ atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan | | 0 dokumen | 0 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | 70.000.000 |
| | 2 | 11 | 06 | 2 | 01 | 0009 | | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah | Jumlah Badan usaha dan/ atau kegiatan | | 25 badan usaha | 6.760.000 | Pendapatan Asli Daerah | | 80.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|--------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|--|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan LH | yang diawasi | | | | | | | |
| VII. | 2 | 11 | 08 | | | | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | 43.999.484 | | | | 140.000.000 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | | <i>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | 43.999.484 | | | | 140.000.000 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Kelompok Masyarakat/ Pelaku Usaha/ Kegiatan yang terlibat | 2 orang | 36.699.484 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 | |
| | 2 | 11 | 08 | 2 | 01 | 0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat | Jumlah lembaga pendidikan formal/ lembaga masyarakat/ komunitas/ kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH | 5 lembaga | 7.300.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 | |
| VIII. | 2 | 11 | 09 | | | | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT | | | 27.480.000 | | | | 70.000.000 | |
| | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | | <i>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat</i> | | | 27.480.000 | | | | 70.000.000 | |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|------------|----------|-----------|-----------|---|----|------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | <i>Daerah Kabupaten/Kota</i> | | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 09 | 2 | 01 | 0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH | | 4 entitas | 27.480.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 70.000.000 |
| IX. | 2 | 11 | 10 | | | | PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | 16.760.000 | | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | | <i>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</i> | | | | 16.760.000 | | | | 50.000.000 |
| | 2 | 11 | 10 | 2 | 01 | 0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kab/Kota yang ditindaklanjuti/ ditangani | | 10 pengaduan | 16.760.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 50.000.000 |
| X. | 2 | 11 | 11 | | | | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN | | | | 4.579.097.500 | | | | 1.245.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | | <i>Pengelolaan Sampah</i> | | | | 4.529.097.500 | | | | 1.185.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0004 | Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan | Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat | | 10 kelompok | 120.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 140.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----------|----------|----|----|---|----|------|--|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | | | | | | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | | | | | | | Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada | | 1 dokumen | 15.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 25.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir | | 1 unit | 3.055.250.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 220.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan | | 1 dokumen | 199.129.824 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 35.000.000 |

| No | Kode | | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----|------|----|----|---|----|------|---|---|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| a | B | | | | | | C | D | E | F | G | h | I | j | K |
| | | | | | | | | ditetapkan | | | | | | | |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0017 | Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan | | 36.136 Ton | 954.717.676 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 400.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0018 | Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah | | 10 laporan | 150.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 320.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 01 | 0021 | Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan | jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan | | 1 dokumen | 35.000.000 | Pendapatan Asli Daerah (PAD) | | | 45.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 02 | | <i>Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta</i> | | | | 50.000.000 | | | | 60.000.000 |
| | 2 | 11 | 11 | 2 | 02 | 0001 | Pelayanan Perizinan Berusaha | Jumlah Rekomendasi | | 12 | 50.000.000 | Pendapatan | | | 60.000.000 |

| No | Kode | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program /Kegiatan Sub Kegiatan | Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana) | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 | |
|----------|----------|---|--|------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| <i>a</i> | <i>B</i> | <i>C</i> | <i>D</i> | <i>E</i> | <i>F</i> | <i>G</i> | <i>h</i> | <i>I</i> | <i>j</i> | <i>K</i> |
| | | Terintegrasi Secara Elektronik | Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi | | rekomendasi | | Asli Daerah (PAD) | | | |
| | | | | | | 36.477.026.561 | | | | 32.750.000.000 |

3.4 Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi Perangkat Daerah adalah inovasi perangkat daerah dalam menemukan sesuatu hal yang baru atau melakukan berbagai pembaharuan yang terbentuk dalam sebuah produk, ide, desain, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal memiliki beberapa inovasi untuk meningkatkan kinerja, antara lain :

1. Pengolahan sampah organik;
2. RTH Kebun Tanaman Langka;
3. Ekosistem Sekolah Hijau;
4. Jejaring Tanam Pohon; dan
5. Sedekah Sampah.

Penjelasan mengenai latar belakang inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yakni agar inovasi tersebut dapat berdampak pada ketercapaian indikator daerah/perangkat daerah khususnya dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Berikut penjelasan mengenai beberapa inovasi-inovasi yang akan dilaksanakan kedepannya.

1. Pengolahan sampah organik

Dalam inovasi pengolahan sampah organik ini berharap permasalahan mengenai sampah di Kabupaten Kendal khususnya sampah organik dapat teratasi dengan diproses menjadi pupuk kompos yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan pupuk organik taman/RTH yang dikelola Dinas.

2. RTH Kebun Tanaman Langka;

Dengan adanya RTH Kebun Tanaman Langka diharapkan kedepannya RTH dapat menjadi tempat edukasi bagi masyarakat akan habitat tanaman langka agar masyarakat mengetahui jenis-jenis tanaman langka yang ada dan dapat menanamnya di sekitar rumah tempat tinggal.

3. Ekosistem Sekolah Hijau

Pada inovasi Ekosistem Sekolah Hijau ini tujuan dasarnya adalah mengarah kepada siswa-siswi Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) khususnya Sekolah Adiwiyata. Dengan inovasi ini berharap agar sekolah dapat menerapkan program dan aktifitas

Pendidikan yang mengarah pada kesadaran lingkungan hidup.

4. Jejaring Tanam Pohon

Tanam pohon sangat penting bagi berkelanjutan kehidupan bumi ini karena memiliki banyak manfaat antara lain menyerap polusi, menghasilkan oksigen, menurunkan emisi karbon, mencegah banjir, menjaga kelestarian hidup hewan dan tumbuhan, menciptakan lingkungan yang sejuk dan hijau. Oleh karena itu Jejaring Tanam Pohon dipilih menjadi salah satu inovasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal.

5. Sedekah Sampah

Inovasi Sedekah Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup telah dijalankan sekitar setahun ini. Kegiatan ini sementara menyasar pada karyawan dan karyawan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal yang setiap hari Senin dan Jumat wajib membawa sampah dari rumah masing-masing untuk kemudian dikumpulkan dan diserahkan ke Bank Sampah Induk Kendal untuk di proses pengolahan sampah. Kedepannya inovasi Sedekah Sampah ini bisa dilaksanakan ke masyarakat agar dapat memilah sampah dan mengolah sampah.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447). Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan ketentuan implementatif dari penerapan Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Permendagri No 90 Tahun 2019 sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyediakan dan menyajikan informasi secara berjenjang dan mandiri berupa penggolongan / pengelompokan, pemberian kode, dan daftar penamaan menuju *single codebase* untuk digunakan dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta pelaporan kinerja keuangan.

Klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 90 Tahun 2019 merupakan perwujudan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang didesentralisasikan sehingga pemanfaatannya akan sangat mendukung proses penyelenggaraan:

1. Perencanaan Pembangunan daerah;
2. Perencanaan anggaran daerah;
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah;
4. Akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
5. Pertanggungjawaban keuangan daerah;
6. Pengawasan keuangan daerah; dan
7. Analisis informasi pemerintahan daerah lainnya.

Sesuai dengan Pasal 3 Permendagri No 90 Tahun 2019, bahwa klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur terdiri atas urusan, bidang urusan, program, kegiatan, dan sub kegiatan. Disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan atau dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Adapun kegiatan mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah. Sedangkan Sub

Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah.

Mengacu pada rencana program dalam RPJMD 2021-2026 Kabupaten Kendal yang terdiri dari dari program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH Pagu Rp.14.983.580.670,- :

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.301.200.000,- :

Sub Kegiatan :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp.145.000.000,- ;

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp.74.200.000,- ; dan

c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.82.000.000,- .

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp.10.209.046.200,- :

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp.10.209.046.200,- .

C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp.125.000.000,- :

Sub Kegiatan :

a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Rp.75.000.000,- ; dan

b. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan Rp.50.000.000,-

D. Administrasi Umum Perangkat Daerah Rp.763.844.470,- :

Sub Kegiatan :

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp.75.000.000,- ;

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp.125.000.000,- ;

c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp.128.840.000,- ;

- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp.425.004.470,- ; dan
- e. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD Rp.100.000.000,- .
- E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp.240.450.000,- :
Sub Kegiatan :
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Rp.42.800.000,- ; dan
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya Rp.197.650.000,- .
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan Rp.1.963.390.000,- :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp.10.000.000,- ;
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp.942.500.000,- ; dan
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Rp.1.028.890.000,- .
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.1.380.650.000,- :
Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp.1.050.000.000,- ;
 - b. Pemeliharaan Mebel Rp.65.000.000,- ;
 - c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya Rp.68.000.000,- ; dan
 - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Rp.197.650.000,- .

2. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP Pagu Rp.225.000.000,-

- A. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kabupaten Kota Rp.225.000.000,- .
Sub Kegiatan :
 - a. Pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Rp.80.000.000,- ; dan
 - b. Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota Rp.145.000.000,- .

3. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LH KAB/KOTA Pagu Rp.10.810.988.907,-

- A. Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan LH Kab/Kota
Sub Kegiatan Rp.185.090.000,-:

- a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran LH dilaksanakan terhadap media Tanah, Air, Udara dan Laut Rp.135.090.000,- ; dan
 - b. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kab/Kota Rp.50.000.000,- .
- B. Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota Sub Kegiatan Rp.77.360.000,- :
- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan LH pada masyarakat Rp.19.600.000,- ;
 - b. Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Rp.27.980.000,- ; dan
 - c. Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Rp.29.780.000,-
- C. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan LH Kab/Kota Sub Kegiatan Rp.10.548.538.907,- :
- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Rp.4.874.618.583,- ;
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Rp.5.647.770.324,- ; dan
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Rp.26.150.000,- .

4. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Pagu Rp.5.65.000.000,-

- A. Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kab/kota Rp.5.650.000.000,- Sub Kegiatan :
- a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rp.5.500.000.000,- ; dan
 - b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Rp.150.000.000,- .

5. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) Pagu Rp.133.360.000,-

- A. Penyimpanan Sementara Limbah B3 Rp.25.500.000,- Sub Kegiatan :
- a. Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknik Penyimpanan Sementara Limbah B3 Rp.25.500.000,- .
- B. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp.107.860.000,-

Sub Kegiatan :

- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Rp.107.860.000,- .

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) Pagu Rp.6.760.000,-

- A. Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp.6.760.000,-

Sub Kegiatan :

- a. Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Rp.6.760.000,-

7. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pagu Rp.43.999.484,-

- A. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota Rp.43.999.484,-

Sub Kegiatan :

- a. penyelenggaraan penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup Rp.36.699.484,- ; dan
- b. Peningkatan kapasitas dan kompetensi Sumber daya manusia bidang lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan Rp.7.300.000,- ;

8. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT Pagu Rp.27.480.000,-

- A. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota Rp.27.480.000,-

Sub Kegiatan :

- a. penilaian kinerja masyarakat / lembaga masyarakat / dunia usaha/ dunia pendidikan/ filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Rp.27.480.000,- .

**9. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP Pagu
Rp.16.760.000,-**

A. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kab/Kota Rp.16.760.000,-

Sub Kegiatan :

a. Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten Rp.16.760.000,- .

10. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Pagu Rp.4.579.097.500,-

A. Pengelolaan Sampah Rp.4.579.097.500,-

Sub Kegiatan :

a. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Rp.120.000.000,- ;

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan Rp.15.000.000,- ;

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Rp.3.055.250.000,- ;

d. Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota Rp.199.129.824,- ;

e. Penanganan Sampah melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, Pusat Pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan Rp.954.717.676,- ;

f. Pengurangan Sampah melalui Pembatasan timbulan sampah Rp.150.000.000,- ; dan

g. Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan Rp.35.000.000,- .

B. Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang diselenggarakan oleh Swasta Rp.50.000.000,-

Sub Kegiatan :

a. Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Rp.50.000.000,- .

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal Tahun 2025 yang telah disusun, merupakan acuan dasar yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada tahun 2025 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Kendal.

Kendal, 21 Agustus 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL



ARIS IRWANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19660715 199003 1 007